

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam Produksi dan distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kotamadya diseluruh Indonesia. Aktivitas PDAM antara lain mengumpulkan air bahan baku atau air yang kurang bersih, mengolah menjadi air bersih dan sampai mendistribusikan air ke pelanggan. Perkembangan dalam ilmu teknologi dan computer saat ini sudah sangat pesat, seiring dengan kebutuhan untuk membantu manusia yang terus meningkat. Komputer semakin banyak dibutuhkan untuk membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam aspek industri dan bisnis. Dalam dunia industri komputer dapat membantu mengembangkan tingkat kebutuhan dan memaksimalkan pekerjaan, serta membantu ke-efisienan dan pemanfaatan secara maksimal bahan baku, ruang dan waktu pada proses produksi. Informasi tentang pemakaian air yang digunakan pelanggan sangatlah dibutuhkan untuk mencapai target produksi dan pendistribusian air di setiap bulannya. Kurangnya akan pemakaian air terjadi diakibatkan keterlambatan produksi yang berakibat juga tidak memenuhinya target dalam pendistribusian air menjadi permasalahan yang selalu terjadi pada PDAM Kota Kupang. Sehingga dalam hal ini sangat dibutuhkan sistem untuk memprediksi pemakaian air yang berdasarkan dari pemakaian sehari-hari dalam setiap bulannya sebagai acuan untuk merencanakan produksi dan pendistribusian air

dibulan berikutnya, pada PDAM Kota Kupang dengan menganalisis data-data jumlah air yang digunakan para pelanggan.

PDAM sebagai badan usaha milik daerah, diharapkan dapat mandiri dalam mengoperasikan perusahaan maupun mengembangkan tingkat pelayanan. Perolehan pendapatann PDAM berasal dari penjualan air bersih dan sangat terikat dari tarif yang diberlakukan. Penyediaan air bersih bagi masyarakat melalui PDAM, merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum. Sebagai perusahaan penyedia air bersih atau air minum PDAM dituntut untuk dapat menyediakan kebutuhan air bersih masyarakat yang memenuhi syarat kualitas dan kuantitas. Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapainya ada perusahaan keuntungan maksimal dan ada yang tidak, misalnya dalam bentuk sosial, tujuan perusahaan berbeda-beda, namun salah satu tujuan yang selalu ada pada perusahaan adalah profitabilitas. Selanjutnya lahirnya BUMD diilhami oleh peraturan Perundang-undangan No 17 Tahun 1960, dan lahirnya UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan UU No 6 Tahun 1969 sebagai pengganti UU No 5 Tahun 1962.

Salah satu BUMD yang mengemban amanat dan peran strategis di daerah adalah PDAM, yang berfungsi melayani kebutuhan hajat hidup orang banyak dan sekaligus menggali dana masyarakat melalui perolehan keuntungan dari usahanya untuk digunakan kembali dalam membangun sarana dan prasarana yang di perlukan oleh masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berbeda dengan perusahaan swasta murni yang selalu

berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Salah satu tujuan PDAM adalah turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dengan cara menyediakan air minum yang bersih, sehat, dan memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat disuatu daerah, yang sekaligus merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat.

Apabila pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No:690-069 Tahun 1992, tentang Pola Petunjuk Teknis Pengolahan PDAM, tegaskan bahwa PDAM mempunyai tugas pokok pelayanan umum kepada masyarakat, dimana dalam menjalankan fungsinya PDAM diharapkan mampu membiayai dirinya sendiri (*self financing*) dan harus berusaha mengembangkan tingkat pelayanannya, disamping itu PDAM juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pembangunan kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM dinyatakan bahwa pendirian PDAM adalah untuk memenuhi pelayanan dan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat serta sebagai salah satu sumber PAD.

Untuk mencapai tujuan maka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pembinaan terhadap PDAM harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan asas ekonomi perusahaan yang sehat. Dari ketentuan yang mengatur tentang keberadaan PDAM sangat jelas bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia air bersih dan dalam upaya peningkatan pelayanan public tidak terlepas dari dimensi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan yang memadai. Tarif air merupakan salah satu unsur penentu untuk memperoleh pendapatan

PDAM, sedangkan pendapatan sangat penting untuk kegiatan operasional PDAM. Pendapatan PDAM yang utama berasal dari jumlah penjualan air dan sangat tergantung besar kecilnya tarif air yang berlaku. Berdasarkan PERMENDAGRI NO 23 Tahun 2006 ada 6 prinsip yang dianut dalam menetapkan tarif air minum pada PDAM yaitu:

1. Prinsip keterjangkauan dan keadilan.
2. Prinsip mutu pelayanan.
3. Prinsip pemulihan biaya.
4. Prinsip efisiensi pemakaian air.
5. Prinsip transparansi dan akuntabilitas.
6. Prinsip perlindungan air baku

Tingkat kebutuhan akan air bersih terutama dikota-kota besar terus meningkat. Adanya peningkatan ini dapat diketahui dari analisis statistik air minum yang dikeluarkan oleh biro pusat statistik 2005 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kualitas persediaan air bersih terus meningkat, tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang disebabkan oleh adanya laju urbanisasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi.

Kehidupan masyarakat tidak akan aman dan sejahtera jika sumber-sumber air semakin merosot adanya. Tanah akan gersang tanpa air. Air pun tidak akan terapung dengan baik tanpa tumbuh-tumbuhan. Untuk melindungi air agar tidak hanyut ke laut harus dipertahankan berbagai tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan melalui akar-akarnya berfungsi untuk melindungi air hujan agar tidak hanyut ke laut. Jadi tumbuh-tumbuhan yang menjaga air itu senantiasa terlindung dengan baik. Sehubungan dengan itu, menjaga

kelestarian hutan adalah salah satu upaya yang perlu dilakukan disamping juga sekaligus menjaga kebersihan air yang mengalir disungai. Air sungai perlu mendapatkan perlindungan agar tetap bersih dari berbagai sumber pencemaran, seperti dengan tidak membuang limbah rumah tangga, industri, dan sampah atau kotoran lainnya ke sungai.

Di Indonesia permasalahannya mengenai pendistribusian air, pemanfaatannya dikelola oleh Negara yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tersebut diberi wewenang oleh Negara untuk mengelola sumber daya air yang pemanfaatannya ditunjukkan konsumsi masyarakat secara merata dan diharapkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tersebut mampu menjaga kapasitas air tersebut yang tersedia dalam upaya untuk memenuhi permintaan air bersih.

Pembangunan sektor air bersih berhadapan dengan aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi, sektor air bersih dituntut menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah ekonomi dalam rangka memandu alokasi sumber daya air dan mendorong terselenggaranya sektor usaha selayaknya kooperatif yang professional, berperilaku efisien, dan menghasilkan manfaat bagi sektor ekonomi lainnya. Dampak aspek sosial, sektor air bersih berhadapan dengan nilai-nilai sosial yang harus diaspirasikan dalam pembangunan serta kedudukannya sebagai sektor publik yang paling mendasar muncul kesadaran yang sama yakni sasaran yang menyediakan sarana dan air bersih bagi banyaknya penduduk. Sedangkan dalam aspek lingkungan, sektor air bersih berhadapan dengan implikasi yang bernuansa sosial. Kebutuhan air bersih ini akan selalu meningkat, seiring dengan

perkembangan penduduk yang cukup pesat di kota kupang disebabkan oleh bertambahnya kebutuhan untuk pelayanan rumah tangga. Kebutuhan air bersih yang memenuhi syarat baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat kota kupang, oleh karena itu optimalisasi pelayanan air bersih harus selalu diupayakan untuk dicapai, seiring dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan tingkat sosial ekonomi masyarakat yang dilayani. Untuk itu pembangunan infrastruktur dibidang air bersih perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tingginya permintaan akan pelayanan air bersih saat ini di Kota Kupang, sepenuhnya belum tertangani dengan optimal, baik segi pelayanan maupun kapasitas produksi (PDAM). Penduduk kota kupang saat ini belum terlayani dengan baik pilihan alternatif yang digunakan masyarakat selain memanfaatkan sumber air minum dari (PDAM) adalah dengan memanfaatkan air tanah dangkal, air tanah dalam potensi sumberdaya air lainnya, baik air permukaan maupun air tanah dalam kawasan yang belum terjangkau oleh pelayanan PDAM.

Oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya Permintaan Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum menjadi sangat dipertanyakan agar kelestarian air tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan manusia sampai kapanpun dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk melihat besarnya jumlah permintaan air di kota kupang dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya permintaan air bersih antara lain: harga air bersih, dan jumlah penduduk. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bening Lontar Kota Kupang, melalui Direktur Utama

kembali menerapkan penyesuaian tarif air PDAM setelah ada evaluasi menyeluruh terhadap penyesuaian tarif air yang telah diterapkan sebelumnya, karena ada kewajaran tentang biaya operasional perusahaan yang memang membutuhkan biaya yang cukup tinggi, dalam evaluasi PDAM disebutkan, tarif yang dibebankan saat ini terlalu rendah sehingga tidak seimbang dengan biaya operasional, akibatnya PDAM tidak dapat melakukan investasi jangka panjangnya guna mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Atas pertimbangan tersebut penyesuaian tarif dasar air PDAM tersebut diterapkan.

Tabel 1.1
Permintaan Air Bersih Kota Kupang
Tahun 2011 – 2018 (Ribu/m³)

Tahun	m³
2011	187.235 m ³
2012	221.946 m ³
2013	263.232 m ³
2014	339.757 m ³
2015	584.427 m ³
2016	692.345 m ³
2017	820.190 m ³
2018	971.643 m ³

Sumber: PDAM Kota Kupang Dalam Angka Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan Permintaan Air Bersih di Kota Kupang setiap tahun meningkat dari tahun 2011 sebesar 187.235 ribu/m³ dan pada tahun 2012 sebesar 221.946 ribu/m³ dan pada tahun 2013 sebesar 263.232 ribu/m³ dan pada tahun 2014 sebesar 339.757 ribu/m³ dan pada tahun 2015 sebesar 584.427 ribu/m³ dan pada tahun 2016 sebesar 692.345 ribu/m³ dan pada tahun 2017 sebesar 820.190 ribu/m³ dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 971.643 ribu/m³

Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan permintaan barang atau jasa adalah skala yang menunjukkan jumlah produk yang diinginkan dan mampu dibeli konsumen pada berbagai kemungkinan harga selama waktu tertentu dan hal lain diasumsikan konstan. Di dalam dunia nyata, suatu barang mempunyai harga pasar. Oleh karena itu permintaan baru akan mempunyai arti bila didukung oleh tenaga beli dari yang meminta barang tersebut. Permintaan yang didukung oleh kekuatan beli seseorang tergantung dari pendapatan yang dapat dibelanjakan dan harga barang. Secara sistematis dapat dijelaskan bagaimana perubahan harga dan pendapatan secara bersama-sama mempengaruhi terhadap jumlah barang yang diminta

Tabel 1.2
Tarif Air Bersih Kota Kupang
Tahun 2011-2018(ribu/m³)

Tahun	Tarif Air Bersih(M³)
2011	5.884,34 m ³
2012	7.039,15 m ³
2013	7.254,19 m ³
2014	7.475,54 m ³
2015	7.621,13 m ³
2016	7.117,81 m ³
2017	7.435,89 m ³
2018	7.652,91 m ³

Sumber : PDAM Kota Kupang Dalam Angka Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.2 diatas tarif air bersih Kota Kupang tahun 8 tahun terakhir berfluktuasi. Dimana pada tahun 2011 tarif air bersih sebesar 5.884,34 ribu/m³ meningkat pada tahun 2012 sebesar 7.039,15 ribu/m³ dan meningkat pada tahun 2013 7.254,19 ribu/m³ dan meningkat pada tahun 2014 7.475,54 ribu/m³ dan meningkat pada tahun 2015 sebesar 7.621,13 ribu/m³ dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 7.117,81 ribu/m³ dan pada tahun 2017 sedikit

meningkat sebesar 7.435,89 ribu/m³ dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 7.652,91 ribu/m³.

Tarif air bersih Kota Kupang melonjak lantaran kemarau yang berdampak terhadap berkurangnya pasokan air dari perusahaan daerah air minum (PDAM) setempat ke rumah penduduk kondisi itu disebabkan debit sumber-sumber air yang dikelola PDAM terus menurun.

Tabel 1.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Kupang
Tahun 2011-2018 (Miliar Juta/Rp)

Tahun	PDRB (ADHB)Juta/Rp
2011	10.319.416,9
2012	11.610.350,7
2013	13.058.585,6
2014	14.815.425,3
2015	16.688.432,3
2016	18.763.435,1
2017	20.571.174,2
2018	23.023.451,0

Sumber : PDAM Kota Kupang Dalam Angka Tahun 2020

Dari data diatas disimpulkan bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2011 sampai 2018 mengalami peningkatan yaitu 2011 sebesar 10.319.416,9 dan pada tahun 2018 sebesar 23.023.451,0 juta rupia.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah/daerah. Karena keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam memobilisasi sumberdaya yang terbatas adanya sedemikian rupa, sehingga mampu melakukan perubahan struktural yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan struktur ekonomi yang seimbang. Secara umum Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung berdasarkan 2 (dua) pendekatan

yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan Atas Harga Berlaku dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kota Kupang
Tahun 2011-2018 (Jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2011	349.344 jiwa
2012	365.348 jiwa
2013	378.425 jiwa
2014	380.084 jiwa
2015	390.877 jiwa
2016	402.286 jiwa
2017	412.708 jiwa
2018	423.800 jiwa

Sumber : PDAM Kota Kupang Dalam Angka Tahun 2014-2018

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kota Kupang setiap tahun meningkat yaitu dari tahun 2011 sebesar 349.344 jiwa. Dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 423.800 jiwa.

Dalam sebuah Negara pasti memiliki jumlah penduduk dan warga Negara. Penduduk yang telah memiliki usia yang ditetapkan dalam peraturan UU akan memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Sehingga sudah sah menjadi warga Negara suatu Negara.

Oleh karena itu masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terhadap jumlah permintaan air bersih di kota kupang.

Berdasarkan uraian pada pendahuluan diatas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul:

“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Di Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2018”.

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan tulisan ini adalah:

1. Bagaimanapengaruh tarifair bersihterhadap jumlah permintaan air bersih PDAM Kota Kupang.
2. Bagaimana pengaruhPDRB Atas Dasar Harga Berlaku, terhadap jumlah permintaan air bersih PDAMKota Kupang.
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk,terhadapjumlah permintaan air bersihPDAM Kota Kupang.

1.3. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh tarif air bersih terhadap jumlah permintaan air bersih pada PDAM Kota Kupang.
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, terhadap jumlah permintaan air bersihpada PDAM Kota Kupang.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, terhadap permintaan air bersih pada PDAM Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah Kota Kupang bagi Perusahaan Daerah Air Minum hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu masukan agar PDAM juga mengetahui apa saja yang mempengaruhi kebutuhan tarifair bersih sehingga dapat

memperkirakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun ke tahun.

2. Bagi penelitian selanjutnya hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada PDAM Kota Kupang sehingga dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan publik dalam bidang ekonomi.